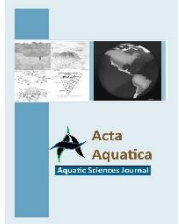




Acta Aquatica

Aquatic Sciences Journal



Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam konservasi wilayah pesisir di Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Jaya

The government's role and the level of community participation in conservation activities of the coastal area in West Aceh Regency and Aceh Jaya Regency

Dewi Fithria ^{a *} dan Agustiar ^b

^a Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Teuku Umar

^b Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Teuku Umar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi wilayah pesisir, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam konservasi wilayah pesisir di Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Jaya. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan kegiatan konservasi wilayah pesisir sebagai berikut : a) Proses perencanaan konservasi wilayah pesisir masih bersifat top down, dimana perencanaan kegiatan dan anggaran, serta menentukan luas areal konservasi tidak partisipatif atau tidak melibatkan warga. b) Dalam pelaksanaan kegiatan konservasi wilayah pesisir peran pemerintah masih dominan. c) Peran pemerintah dalam kegiatan penyuluhan, alokasi anggaran dan luas areal yang dikonservasi masih rendah. 2) Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam konservasi wilayah pesisir sebagai berikut: a) Proses perencanaan konservasi wilayah pesisir masih bersifat bottom up, dimana perencanaan kegiatan dan anggaran, serta menentukan luas areal konservasi dilakukan secara partisipatif dan melibatkan warga. b) Tingginya peran dan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan konservasi wilayah pesisir. c) Peran pemerintah dalam kegiatan penyuluhan, alokasi anggaran dan luas areal yang dikonservasi tinggi. 3) Partisipasi masyarakat dalam konservasi wilayah pesisir termasuk dalam kategori sedang untuk kedua kabupaten tersebut.

Kata kunci: Peran pemerintah; Partisipasi masyarakat; Konservasi wilayah pesisir

Abstract

This research aims to know the Government's role and the level of community participation in conservation activities of the coastal area, know the factors that affect participation in the conservation of the coastal area in West Aceh and Aceh Jaya. The research method used is quantitative research using survey method. The results showed that; 1) West Aceh Regency Government's role in carrying out the activities of the conservation in the coastal area as follows: the conservation planning process) of the coastal area still are top down, where the planning of activities and budgets, as well as determine the vast acreage of conservation is not participatory or does not involve the citizens. b) In implementation of the conservation activities of the coastal area the role of Government is still dominant. c) The role of Government in public, the allocation of budgets and vast acreage that is still low. b) Height of the role and the Government's commitment in the implementation of conservation activities of the coastal area. c) The role of Government in public, the allocation of budgets and wide areal for conservation was high. 3) Community participation in conservation of the coastal area is included in the category are for both regency.

Keywords: Government's role; Public participation; Coastal area conservation

1. Pendahuluan

Wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Sumberdaya yang terdapat di wilayah pesisir merupakan sumberdaya potensial di Indonesia karena didukung oleh adanya garis pantai sepanjang sekitar 81.000 km. Garis pantai yang panjang ini menyimpan potensi kekayaan sumber alam

* Korespondensi: Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Aceh Barat. Provinsi Aceh. Indonesia. 23615
Tel: +6265-57006001. Fax: 065-57551188
e-mail: dewi.fithria@gmail.com

yang besar. Potensi itu diantaranya potensi hayati dan non hayati. Potensi hayati misalnya perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang, sedangkan potensi nonhayati misalnya mineral dan bahan tambang serta pariwisata.

Di daerah ini juga berdiam para nelayan yang sebagian besar masih prasejahtera. Ada beberapa masalah yang terjadi dalam pembangunan wilayah pesisir di Indonesia antara lain adalah pencemaran, degradasi habitat, eksploitasi berlebihan sumberdaya alam, abrasi pantai, konversi kawasan lindung menjadi peruntukan pembangunan lainnya dan bencana alam (Latama, 2002). Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Jaya merupakan salah satu daerah yang paling parah mengalami kerusakan lingkungan pesisir akibat bencana alam tsunami pada tahun 2004 yang lalu. Kerusakan wilayah pesisir ini apabila tidak dilakukan usaha perbaikan maka dapat mengancam kelestarian sumberdaya yang ada dan berujung pada penurunan produksi sumberdaya laut. Pada tahun 2006 pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat telah melakukan upaya konservasi wilayah pesisir di wilayah ini berupa penanaman pengayaan di wilayah pesisir dengan aneka tanaman konservasi dan membentuk kawasan konservasi dan dilanjutkan dengan tahap pemeliharaan.

2. Bahan dan Metode

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive*, untuk Kabupaten Aceh Barat meliputi Kecamatan Sama Tiga, Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo dan Kabupaten Aceh Jaya meliputi Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Jaya dan Kecamatan Krueng Sabee. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2014.

Variabel dasar yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- Status sosial ekonomi masyarakat meliputi usia, tingkat pendidikan, pendapatan, jumlah anggota keluarga dan lama domisili.
- Partisipasi masyarakat dalam konservasi wilayah pesisir diukur melalui indikator keikutsertaan dalam proses perencanaan kegiatan, biaya, luas areal konservasi, jadwal kegiatan, intensitas kehadiran dalam kegiatan penyuluhan, pernah atau tidak pernah melakukan penanaman dan pemeliharaan di wilayah pesisir baik melalui program pemerintah maupun secara swadaya.
- Peran pemerintah dalam konservasi wilayah pesisir diukur meliputi indikator persentase besarnya dana, intensitas pelaksanaan penyuluhan dan luas areal kegiatan konservasi dan dituangkan menjadi strategi intervensi Pemerintah daerah dalam konservasi wilayah pesisir.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa status sosial masyarakat, partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam konservasi wilayah pesisir dan peran pemerintah dalam konservasi wilayah pesisir, dikumpulkan langsung melalui beberapa cara yaitu:

- Wawancara (interview), dilakukan kepada responden yaitu masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan konservasi wilayah pesisir memperoleh data sosial ekonomi dan partisipasi masyarakat dalam konservasi wilayah pesisir dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.
- Observasi, yaitu pengambilan data dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian yang meliputi hasil kegiatan konservasi wilayah pesisir dan sosial ekonomi masyarakat, kegiatan observasi dilakukan dengan

menggunakan instrument pengamatan berupa daftar pengamatan dan penggunaan kamera foto untuk merekam apa yang dilihat.

- Wawancara mendalam (indepth interview), yang dilakukan kepada responden terpilih yaitu aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat guna mengetahui peran pemerintah dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam konservasi wilayah pesisir.

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif. Adapun analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

- Data sosial ekonomi responden dan data partisipasi masyarakat dalam konservasi wilayah pesisir diolah dengan menggolongkan dan menghitung jawaban yang diberikan oleh responden dan dipersentasekan berdasarkan golongan jawaban. Keseluruhan data diolah dengan tabulasi frekuensi dan grafik, yang kemudian dianalisis secara deskriptif.
- Data peran pemerintah dalam konservasi wilayah pesisir dianalisis secara deskriptif.
- Untuk data faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dilakukan tahap-tahap analisis data yang menurut Moleong (1997), secara umum terdapat empat tahapan dalam analisis data yaitu:
 - Pemrosesan satuan (*unitizing*), dilakukan dengan memberikan kode, kategorisasi dan diberi nama pada setiap data untuk menggambarkan perbedaan dari karakteristik atau ciri yang satu dengan yang lainnya. Tahap ini akan berguna untuk mengetahui data yang akan diperlukan lagi dan informan mana yang akan dibutuhkan untuk memberikan informasi berikutnya, yang akan mengarah pada pengambilan suatu kesimpulan.
 - Kategorisasi, berarti menyusun kategori atas dasar pikiran intuisi pendapat atau kriteria tertentu terhadap data atau informasi yang diperoleh. Selanjutnya menempatkan data pada kategori masing-masing.
 - Penafsiran data, terdiri dari proses mengidentifikasi pola-pola, kecenderungan serta penjelasan tentang obyek penelitian yang pada akhirnya akan membawa kita pada suatu kesimpulan. Kesimpulan ini diperoleh dengan didasarkan pada data yang lengkap dan teori yang telah terdapat dalam suatu disiplin ilmu.

Untuk melihat hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam konservasi wilayah pesisir dan peran pemerintah serta partisipasi masyarakat pesisir digunakan regresi linier berganda (Sudjana, 2001):

$$Y = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + \dots + a_6X_6$$

Dimana:

Variabel terikat (Y) adalah peran pemerintah dan tingkat partisipasi masyarakat dalam konservasi wilayah pesisir, sedangkan variabel bebas (variabel X) yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, lama domisili, insentif yang diterima dan intensitas penyuluhan.

3. Hasil dan pembahasan

3.1. Peran pemerintah daerah dalam konservasi wilayah pesisir

Setiap daerah memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam pengelolaan pembangunan wilayah, salah satu wilayah yang memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam melakukan pengelolaan wilayahnya adalah wilayah pesisir. Wilayah pesisir memiliki lebih dari satu system lingkungan dan sumber daya pesisir yang menyebabkan pengelolaan yang akan direalisasikan harus lebih memperhatikan system lingkungan dan sumber daya yang ada. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2013 pernah memberikan bantuan bibit mangrove sebanyak 500 batang, tahun 2009 menanam 4000 batang kelapa dan cemara di sepanjang pesisir pantai Aceh Barat.

Kabupaten Aceh Jaya terletak di sepanjang garis pantai barat selatan Aceh, dengan panjang garis pantai 220,46 Km dengan luas laut Kabupaten 104.527,74 Ha. Pengembangan kawasan konservasi perairan merupakan salah satu program daerah yang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sejak tahun 2008. Dalam rangka kelestarian wilayah pesisir, kawasan konservasi Perairan yang telah diinisiasi oleh FAO pada tahun 2008 bertujuan agar tersedianya suatu area atau kawasan tempat berlindung, memijah atau berkembang biak ikan dalam rangka menjaga sumber daya ikan dan ekosistemnya tetap lestari dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah membentuk dan menetapkan Kawasan Konservasi Perairan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 3 Tahun 2010 Tanggal 21 Januari 2010 Tentang Pembentukan Kawasan Konservasi Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010. Dalam Surat Keputusan ini memutuskan Lhok Rigaih menjadi Kawasan Ramah Lingkungan di salah satu Pulau Semot, di Kecamatan Setia Bakti dan Lhok Kuala Daya menjadi Kawasan Peudhiet Laot Perikanan di Pulau Kluang Kecamatan Jaya serta menetapkan Tim Pelaksana Kawasan Ramah Lingkungan Lhok Rigaih dan Kawasan *Peudhiet Laot* Lhok Kuala Daya.

Pemerintah Kabupaten juga membentuk Struktur Organisasi Dinas sebagai Lembaga Pengelola KKP (Qanun No. 3 Tahun 2010) yang di ketuai langsung oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya dan Struktur Badan Pengelola bersama KKP Tingkat Tapak. Badan Musyawarah pada struktur pengelola bersama KKP tingkat Tapak mempunyai tugas;

- Membuat, memperbaiki, melengkapi aturan- aturan atau ketentuan-ketentuan dari Kawasan Konservasi Perairan (KRL Lhok Rigaih/KRL Keluang Daya).
- Menyelesaikan masalah- masalah yang terjadi dalam pengelolaan KKP.
- Memilih anggota Badan Pelaksana.

Sedangkan Badan Pelaksana mempunyai tugas:

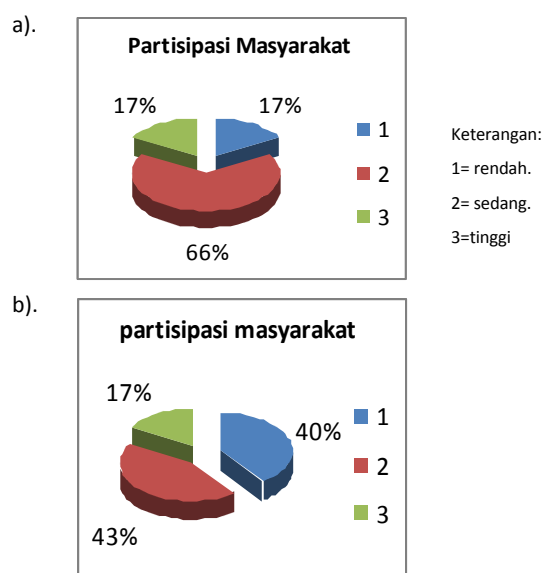
- Membuat perencanaan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KRL Lhok Rigaih / KPL Lhok Kuala Daya).
- Bertanggungjawab dalam perencanaan lingkungan hidup untuk pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang berkelanjutan.
- Mengatur, menjaga kelestarian dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk kepentingan masyarakat.
- Melakukan penangkapan untuk diberikan sanksi adat

terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan dalam keputusan bersama.

- Melakukan pengamanan atas barang atau alat-alat yang dipergunakan.

3.2. Partisipasi masyarakat dalam konservasi wilayah pesisir

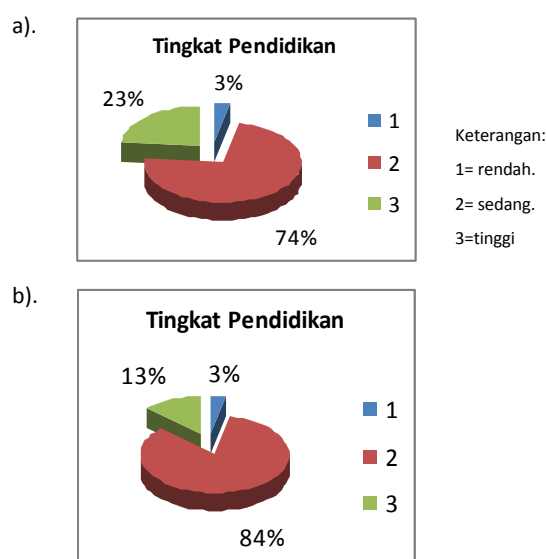
Partisipasi masyarakat dalam konservasi wilayah pesisir di ukur melalui indikator keterlibatan dalam perencanaan kegiatan, biaya, frekuensi mengikuti kegiatan penyuluhan (Gambar 1).



Gambar 1. Partisipasi masyarakat dalam konservasi wilayah pesisir. a). Kabupaten Aceh Barat, b). Kabupaten Aceh Jaya.

3.2.1. Tingkat pendidikan

Secara keseluruhan responden pada umumnya berpendidikan menengah, kondisi ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia (Gambar 2).

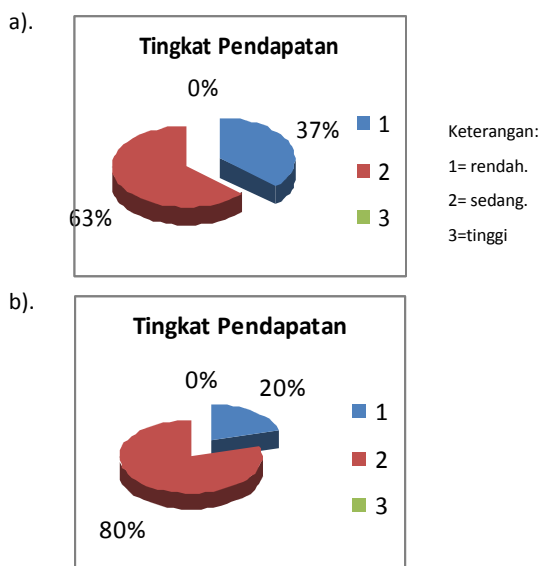


Gambar 2. Tingkat pendidikan masyarakat yang terlibat dalam konservasi wilayah pesisir. a). Kabupaten Aceh Barat, b). Kabupaten Aceh Jaya.

Kualitas pendidikan akan berpengaruh signifikan bagi upaya-upaya menggiatkan mutu partisipasi untuk ikut serta dalam pelestarian pesisir dan kawasan perairan bahwa dengan melakukan konservasi wilayah pesisir akan banyak memberikan manfaat. Ini merupakan tugas berat untuk memotivasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi.

3.2.2. Tingkat pendapatan

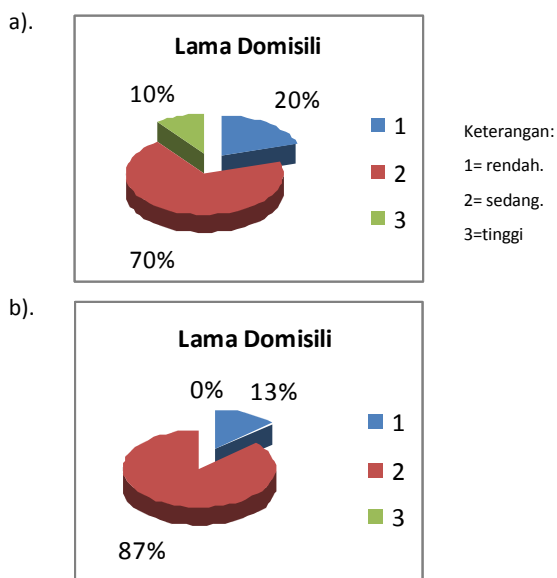
Tingkat pendapatan berkaitan erat dengan keikutsertaan dalam konservasi wilayah pesisir. Semakin tinggi pendapatan maka semakin besar kemungkinan partisipasi masyarakat dalam konservasi wilayah pesisir (Gambar 3).



Gambar 3. Tingkat pendapatan masyarakat yang terlibat dalam konservasi wilayah pesisir. a). Kabupaten Aceh Barat, b). Kabupaten Aceh Jaya.

3.2.3. Lama domisili

Lama domisili berhubungan erat dengan mobilitas tempat tinggal dan keadaan lingkungannya (Gambar 4).

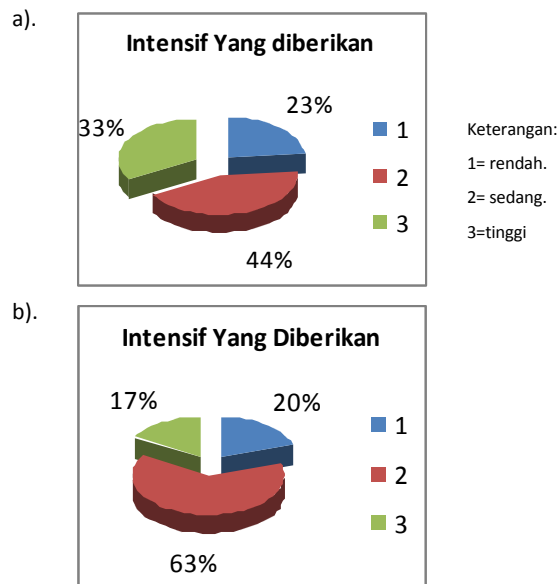


Gambar 4. Lama domisili masyarakat yang terlibat dalam konservasi wilayah pesisir. a). Kabupaten Aceh Barat, b). Kabupaten Aceh Jaya.

Semakin lama tinggal seseorang di suatu tempat maka semakin mapan dalam mengetahui dan memahami perubahan lingkungan yang terjadi di suatu tempat

3.2.4. Insentif yang diterima

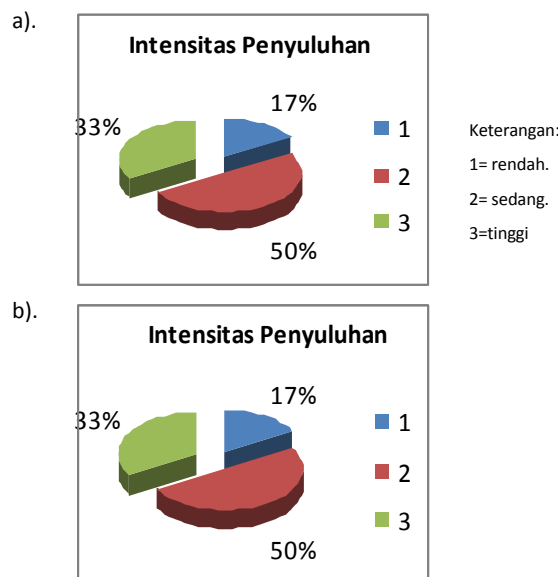
Insentif dalam penelitian ini merupakan upah yang diterima oleh responden terhadap keterlibatannya dalam konservasi pesisir (Gambar 5). Menurut Panggabean (2002), insentif adalah kompensasi yang mengaitkan gaji dengan produktivitas. Insentif merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan.



Gambar 5. Insentif yang diberikan kepada masyarakat yang terlibat dalam konservasi wilayah pesisir. a). Kabupaten Aceh Barat, b). Kabupaten Aceh Jaya.

3.2.5. Intensitas penyuluhan

Partisipasi responden diperoleh dari keikutsertaan responden dalam kegiatan penyuluhan (Gambar 6).



Gambar 6. Intensitas penyuluhan kepada masyarakat yang terlibat dalam konservasi wilayah pesisir. a). Kabupaten Aceh Barat, b). Kabupaten Aceh Jaya.

Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi responden dalam kegiatan penyuluhan dalam kategori sedang, hal ini dapat dilihat dari frekuensi kehadiran responden dalam mengikuti kegiatan penyuluhan.

4. Kesimpulan

Dari hasil penelitian maka dapat suatu kesimpulan:

1. Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan kegiatan konservasi wilayah pesisir sebagai berikut :
 - a. Proses perencanaan konservasi wilayah pesisir masih bersifat *top down*, dimana perencanaan kegiatan dan anggaran, serta menentuka luas areal konservasi tidak partisipatif atau tidak melibatkan warga.
 - b. Dalam pelaksanaan kegiatan konservasi wilayah pesisir peran pemerintah masih dominan.
 - c. Peran pemerintah dalam kegiatan penyuluhan, alokasi anggaran dan luas areal yang dikonservasi masih rendah.
2. Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam konservasi wilayah pesisir sebagai berikut:
 - a. Proses perencanaan konservasi wilayah pesisir masih bersifat *bottom up*, dimana perencanaan kegiatan dan anggaran, serta menentuka luas areal konservasi dilakukan secara partisipatif dan melibatkan warga.
 - b. Tingginya peran dan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan konservasi wilayah pesisir
 - c. Peran pemerintah dalam kegiatan penyuluhan, alokasi anggaran dan luas areal yang dikonservasi tinggi.
3. Partisipasi masyarakat dalam konservasi wilayah pesisir termasuk dalam kategori sedang.

Bibliografi

- Amba, Martha, 1998. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan Mangrove (Studi Kasus di Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kotamadya Ambon, Maluku). Tesis. Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Bengen, D. G., 2002. Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya. PKSPL. IPB. Bogor.
- Dahuri, R., 2001. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu (Edisi Revisi). Pradnya Paramita, Jakarta.
- Latama, G., A. Wantasen, A. Utiah, Desniarti, Dinarwan, Indra, J. Rimper, H. Sinjai, N. A. Umar, S. Darwisito, T. Arifin, dan Y. Paongan, 2002. Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Peluang dan Harapan. IPB, Bogor.
- Moleong, J. Lexi, 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Tarsito. Bandung.
- Nazir, M., 2003. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong No. 6 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Ritohardoyo, S., 2002. Partisipasi Masyarakat Dalam Penghijauan (Studi Kasus Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa

Yogyakarta). Laporan Penelitian. Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

- Soedharma, D., 2010. Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Laut. IPB Press. Bogor.
- Soetrisno, Loekman, 1995. Menuju masyarakat Partisipatif. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Sudjana, 2001. Metode Statistik. Penerbit Tarsito. Bandung.
- Tjokroamidjodjo, Bintoro, 1996. Perencanaan Pembangunan. Gunung Agung. Jakarta.
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Penerbit Citra Umbara. Bandung.